



Kontribusi Transparansi, Akuntabilitas, dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada BPKK Kabupaten Pidie Jaya

Nadiatur Rafiq¹, Marjulin², Mariana Mariana³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Indonesia

E-mail: nadiaturrafika24@gmail.com¹, marjulin@pnl.ac.id², mariana@pnl.ac.id³

Article Info

Article history:

Received September 11, 2026

Revised September 15, 2026

Accepted September 18, 2026

Keywords:

Accountability; Good

Governance; Government

Performance; Regional

Finance; Transparency

ABSTRACT

Prior studies have commonly examined transparency, accountability, or good governance separately, leaving the partial contributions of these overlapping constructs insufficiently explained. This study analyzes their partial and joint contributions to regional financial management performance at the Pidie Jaya Regency Financial Management Agency (BPKK). Its novelty lies in estimating two specific mechanisms, transparency and accountability, together with good governance as an umbrella construct to identify its incremental explanatory contribution. A quantitative census survey covered all 75 employees involved in regional financial management. Primary data were collected through a five-point Likert questionnaire and analyzed using multiple linear regression in SPSS version 25. Transparency was positively and significantly associated with financial management performance ($B = 0.329$; $t = 3.431$; $p = 0.001$), as was accountability ($B = 0.187$; $t = 2.144$; $p = 0.035$). In contrast, good governance had a positive but statistically nonsignificant coefficient after controlling for transparency and accountability ($B = 0.091$; $t = 1.233$; $p = 0.222$). The model was jointly significant and explained 30.3% of the variance in performance ($F = 10.285$; $p < 0.001$; $R^2 = 0.303$; adjusted $R^2 = 0.273$). The findings underscore the importance of operational openness and answerability. The nonsignificant coefficient does not imply that governance is irrelevant; rather, no distinct partial contribution beyond the specific transparency and accountability mechanisms was detected. BPKK should prioritize accessible information, explicit responsibilities, and documented performance follow-up.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received September 11, 2026

Revised September 15, 2026

Accepted September 18, 2026

ABSTRAK

Studi terdahulu lebih sering menguji transparansi, akuntabilitas, atau *good governance* secara terpisah, sehingga kontribusi parsial ketiga konstruk yang beririsan tersebut belum dijelaskan secara memadai. Penelitian ini menganalisis kontribusi parsial dan simultan ketiganya terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Badan

**Kata Kunci:**

Akuntabilitas; Good
Governance; Keuangan Daerah;
Kinerja Pemerintah;
Transparansi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie Jaya. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian dua mekanisme spesifik, yaitu transparansi dan akuntabilitas, bersama *good governance* sebagai konstruk payung untuk mengidentifikasi daya jelas tambahannya. Penelitian menggunakan survei kuantitatif terhadap seluruh 75 pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah; seluruh anggota populasi dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh. Data primer dikumpulkan dengan kuesioner skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda pada SPSS versi 25. Hasil menunjukkan bahwa transparansi berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah ($B = 0,329$; $t = 3,431$; $p = 0,001$), demikian pula akuntabilitas ($B = 0,187$; $t = 2,144$; $p = 0,035$). Sebaliknya, *good governance* menunjukkan koefisien positif, tetapi tidak signifikan setelah transparansi dan akuntabilitas dikendalikan ($B = 0,091$; $t = 1,233$; $p = 0,222$). Secara simultan, ketiga variabel signifikan menjelaskan variasi kinerja ($F = 10,285$; $p < 0,001$; $R^2 = 0,303$; R^2 terkoreksi = $0,273$). Temuan menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang operasional. Tidak signifikannya konstruk *good governance* tidak berarti tata kelola tidak relevan, melainkan belum ditemukan kontribusi parsial yang berbeda dari dua mekanisme tersebut. BPKK perlu memprioritaskan akses informasi yang mudah dipahami, kejelasan tanggung jawab, dan tindak lanjut kinerja yang terdokumentasi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Nadiatur Rafiq
Politeknik Negeri Lhokseumawe
E-mail: nadiaturafiq24@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah menentukan kemampuan pemerintah daerah untuk mengubah sumber daya publik menjadi layanan dan hasil pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menempatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai rangkaian yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan (Republik Indonesia, 2019). Karena itu, kinerja pengelolaan keuangan tidak cukup dinilai dari tersusunnya laporan atau terserapnya anggaran, tetapi juga dari efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan kemampuan mempertanggungjawabkan setiap keputusan penggunaan dana publik.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menyediakan portal transparansi keuangan daerah dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun anggaran 2024 (Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, 2024, 2025). Capaian tersebut merefleksikan pemenuhan perangkat formal pelaporan dan akuntabilitas. Meskipun demikian, opini audit dan ketersediaan dokumen publik belum memberikan bukti mengenai kualitas



proses pengelolaan keuangan dari perspektif aparaturnya maupun besaran kontribusi relatif setiap mekanisme tata kelola terhadap kinerja organisasi.

Bukti empiris dari Aceh memperlihatkan bahwa belanja modal dan penerapan pengukuran berbasis akrual memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (Ramadana et al., 2023). Dari sisi pengawasan, Aisyah et al. (2024) menekankan kualitas temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut audit BPK, sedangkan Adira et al. (2024) menempatkan inspektorat daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai mekanisme penting untuk menjaga efisiensi, kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dibentuk oleh interaksi antara sistem akuntansi, pengawasan, dan perilaku organisasi.

Kerangka agensi membantu menjelaskan persoalan tersebut. Masyarakat dan lembaga perwakilan bertindak sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah daerah dan pengelola keuangan menjalankan mandat sebagai agen. Pemisahan informasi dan kewenangan dapat memunculkan asimetri informasi serta perbedaan kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Transparansi mengurangi kesenjangan informasi melalui penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses, sedangkan akuntabilitas menambahkan kewajiban untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menindaklanjuti hasil. Walaupun saling menguatkan, transparansi dan akuntabilitas tidak identik dan dapat menghasilkan mekanisme kontrol yang berbeda (Hood, 2010). Keduanya berada di dalam kerangka *good governance* yang lebih luas, bersama partisipasi, efektivitas, kepatutan, dan perlindungan hak (Addink, 2019).

Bukti empiris mengenai hubungan mekanisme tata kelola dan kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya konsisten. Eriva dan Handayani (2024), Edowai et al. (2021), serta Amelia dan Hidajat (2025) melaporkan hubungan positif transparansi dan/atau akuntabilitas dengan kinerja. Tinjauan Fathirah et al. (2024) juga menegaskan peran keduanya dalam efektivitas pengelolaan anggaran. Sebaliknya, Merchilia dan Robinson (2024) menemukan akuntabilitas berpengaruh positif, tetapi transparansi berpengaruh negatif pada unit analisis yang mereka teliti, sedangkan Mbipi et al. (2021) menemukan bahwa transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas pelaporan tidak selalu menghasilkan pengaruh signifikan. Untuk konstruk tata kelola yang lebih luas, Indriana dan Nasrun (2019) menemukan pengaruh positif *good governance* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tinjauan Mariana et al. (2025) juga menunjukkan bahwa reformasi akuntansi sektor publik dapat terhambat oleh resistensi birokrasi, beban pelaporan ganda, dan keterbatasan infrastruktur digital.

Kesenjangan penelitian yang mendasari studi ini terdiri atas tiga aspek. Pertama, arah dan signifikansi hubungan transparansi, akuntabilitas, serta *good governance* dengan kinerja pemerintah daerah belum konsisten. Kedua, studi terdahulu yang dirujuk cenderung menguji ketiga variabel sebagai prediktor tersendiri tanpa menelaah secara eksplisit tumpang tindih konseptual transparansi dan akuntabilitas sebagai dimensi *good governance*. Ketiga, bukti empiris pada lembaga pengelola keuangan tingkat kabupaten di Aceh, khususnya BPKK Pidie Jaya, masih terbatas. Akibatnya, belum tersedia penjelasan yang memadai mengenai apakah *good governance* memiliki daya jelas tambahan setelah dua mekanisme spesifik tersebut dikendalikan.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh parsial dan simultan transparansi, akuntabilitas, dan *good governance* terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada BPKK



Pidie Jaya. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian simultan dua mekanisme tata kelola spesifik, yaitu transparansi dan akuntabilitas, bersama *good governance* sebagai konstruk payung dalam satu model regresi. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi kontribusi parsial dan daya jelas tambahan setiap prediktor, sekaligus memperluas studi terdahulu yang lebih dominan menguji hubungan langsung secara terpisah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah menggambarkan keberhasilan organisasi dalam menjalankan siklus keuangan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kinerja tersebut mencakup mutu perencanaan dan penganggaran, ketepatan pelaksanaan dan penatausahaan, keandalan pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menegaskan bahwa pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik, dan harus terhubung dengan informasi kinerja instansi (Republik Indonesia, 2006).

Transparansi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, lengkap, tepat waktu, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Secara operasional, Ritonga dan Syahrir (2016) menilai transparansi keuangan daerah melalui ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan. Dalam lingkungan digital, Maulidi et al. (2025) menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mendukung dokumentasi dan pelaporan yang lebih terstruktur, meskipun manfaatnya tetap bergantung pada kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur. Telaah Cucciniello et al. (2017) serta de Renzio dan Wehner (2017) menunjukkan bahwa manfaat transparansi fiskal dipengaruhi bentuk pengungkapan, mutu informasi, partisipasi, dan kondisi institusional. Dalam perspektif agensi, transparansi menekan asimetri informasi dan memperluas kemampuan pemangku kepentingan untuk memantau keputusan anggaran. Pada tingkat internal, keterbukaan informasi juga memperbaiki koordinasi dan mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, semakin baik transparansi, semakin kuat dukungan informasi bagi kinerja pengelolaan keuangan.

H1. *Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.*

Akuntabilitas dan Kinerja Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemegang mandat untuk menjelaskan keputusan, membuktikan penggunaan sumber daya, melaporkan capaian, serta menerima evaluasi dan tindak lanjut. Akuntabilitas yang berjalan baik memperjelas tanggung jawab, memperkuat disiplin dokumentasi, dan menghubungkan penggunaan anggaran dengan hasil. Mekanisme tersebut diperkirakan meningkatkan konsistensi dan ketepatan proses pengelolaan keuangan. Namun, Dubnick (2005) menegaskan bahwa akuntabilitas tidak otomatis menghasilkan kinerja tanpa mekanisme evaluasi, umpan balik, dan koreksi yang efektif. Kajian Pasaribu et al. (2024) menempatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, integritas kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat sebagai unsur yang saling melengkapi dalam



memperkuat akuntabilitas. Mariana et al. (2025) menambahkan bahwa manfaat reformasi akuntansi publik memerlukan kapasitas kelembagaan dan integrasi sistem informasi yang memadai.

H2. *Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.*

Good Governance dan Kinerja Pengelolaan Keuangan

Good governance merupakan konstruk tata kelola yang lebih luas, yang mencakup kepatutan, transparansi, partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, perlindungan hak, dan integritas (Addink, 2019). Fukuyama (2013) menunjukkan bahwa pengukuran kualitas pemerintahan menghadapi persoalan konseptual, sedangkan Grindle (2004) menekankan perlunya memprioritaskan unsur tata kelola yang esensial dan dapat dilaksanakan. Apabila prinsip-prinsip tersebut terinternalisasi dalam prosedur dan budaya kerja, proses pengelolaan keuangan diharapkan menjadi lebih responsif, taat aturan, dan berorientasi pada hasil. Karena transparansi dan akuntabilitas juga merupakan unsur tata kelola, pengujian simultan diperlukan untuk menilai kontribusi unik konstruk *good governance* di luar kedua unsur tersebut.

H3. *Good governance berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.*

H4. *Transparansi, akuntabilitas, dan good governance secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.*

METODE PENELITIAN

Desain, Populasi, dan Sampel

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori. Unit analisis adalah pegawai/aparatur sipil negara yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah pada BPKK Pidie Jaya, termasuk fungsi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Populasi berjumlah 75 pegawai. Seluruh anggota populasi dijadikan responden melalui teknik sampling jenuh (sensus), sehingga jumlah observasi yang dianalisis adalah 75.

Pengukuran dan Teknik Analisis

Data primer diperoleh melalui kuesioner terstruktur yang mengukur transparansi, akuntabilitas, *good governance*, dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Setiap pernyataan dinilai menggunakan skala Likert lima poin, dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Analisis dilakukan dengan SPSS versi 25, meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dalam model tersebut, Y adalah kinerja pengelolaan keuangan daerah; X1 adalah transparansi; X2 adalah akuntabilitas; X3 adalah *good governance*; α adalah konstanta; β_1 - β_3 adalah koefisien regresi; dan ε adalah galat. Normalitas residual dievaluasi melalui nilai Asymp.



Sig., multikolinearitas melalui tolerance dan variance inflation factor (VIF), sedangkan heteroskedastisitas dievaluasi melalui pola sebar residual.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Responden terdiri atas 35 laki-laki (46,7%) dan 40 perempuan (53,3%). Kelompok usia terbesar adalah 25-35 tahun (42,7%), sedangkan mayoritas responden berpendidikan S1 (81,3%). Komposisi lengkap responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	35	46,7
Jenis kelamin	Perempuan	40	53,3
Usia	25-35 tahun	32	42,7
Usia	36-40 tahun	18	24,0
Usia	41-45 tahun	10	13,3
Usia	46-50 tahun	10	13,3
Usia	51-60 tahun	5	6,7
Pendidikan	D3	11	14,7
Pendidikan	S1	61	81,3
Pendidikan	S2	3	4,0

Catatan. $n = 75$; persentase dapat tidak tepat berjumlah 100 karena pembulatan.

Uji Asumsi Klasik

Nilai Asymp. Sig. uji normalitas residual sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05. Seluruh variabel independen memiliki tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, sehingga tidak terindikasi masalah multikolinearitas. Scatterplot residual tidak menunjukkan pola sistematis, sehingga tidak ditemukan indikasi heteroskedastisitas.

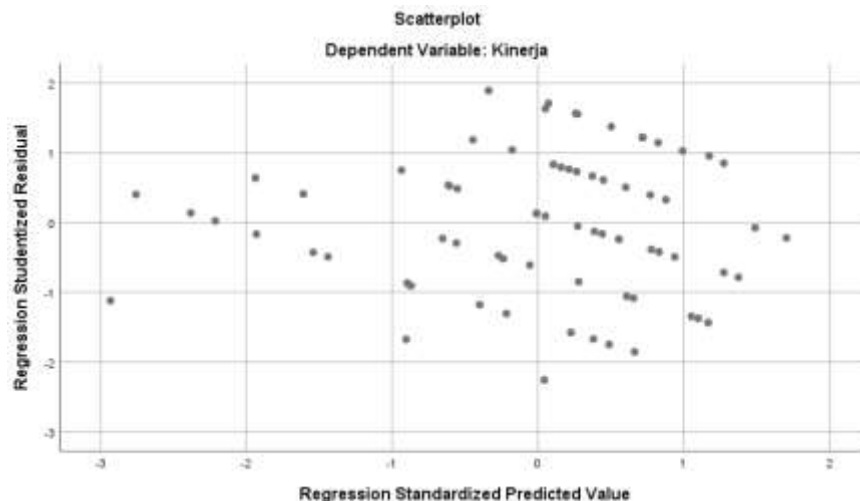
Tabel 2. Ringkasan uji asumsi klasik

Uji	Variabel/indikator	Nilai 1	Nilai 2	Kesimpulan
Normalitas	Residual	Asymp. Sig. = 0,200	-	Normal
Multikolinearitas	Transparansi	Tolerance = 0,864	VIF = 1,158	Tidak terindikasi
Multikolinearitas	Akuntabilitas	Tolerance = 0,832	VIF = 1,202	Tidak terindikasi



Uji	Variabel/indikator	Nilai 1	Nilai 2	Kesimpulan
Multikolinearitas	<i>Good governance</i>	Tolerance = 0,742	VIF = 1,348	Tidak terindikasi
Heteroskedastisitas	Scatterplot residual	Pola acak	-	Tidak terindikasi

Kriteria: $p > 0,05$ untuk normalitas; $\text{tolerance} > 0,10$ dan $VIF < 10$ untuk multikolinearitas.



Gambar 1. Scatterplot residual untuk uji heteroskedastisitas

Sumber: Data penelitian diolah, 2026.

Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

Hasil regresi linear berganda menunjukkan arah koefisien positif untuk seluruh variabel. Transparansi dan akuntabilitas signifikan pada taraf 5%, sedangkan *good governance* tidak signifikan secara parsial. Ringkasan hasil disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil regresi linear berganda

Variabel	B	Std. error	t	p	Keputusan
Konstanta	1,635	3,036	0,539	0,592	-
Transparansi	0,329	0,096	3,431	0,001	H1 didukung
Akuntabilitas	0,187	0,087	2,144	0,035	H2 didukung
<i>Good governance</i>	0,091	0,073	1,233	0,222	H3 tidak didukung

Catatan. Variabel dependen: kinerja pengelolaan keuangan daerah. $R = 0,550$; $R^2 = 0,303$; R^2 terkoreksi = 0,273; $F = 10,285$; $p < 0,001$. H4 didukung.

Persamaan regresi estimasi adalah:

$$Y = 1,635 + 0,329X_1 + 0,187X_2 + 0,091X_3$$

Koefisien transparansi sebesar 0,329 dengan $p = 0,001$ menunjukkan bahwa, dengan akuntabilitas dan *good governance* dikendalikan, peningkatan satu unit skor transparansi berkaitan dengan peningkatan 0,329 unit skor kinerja. Dengan demikian, H1 didukung.



Koefisien akuntabilitas sebesar 0,187 dengan $p = 0,035$ juga menunjukkan hubungan positif dan signifikan, sehingga H2 didukung.

Koefisien *good governance* sebesar 0,091 memiliki $p = 0,222$. Arah hubungan positif, tetapi bukti statistik tidak cukup untuk menyatakan adanya kontribusi parsial setelah transparansi dan akuntabilitas dikendalikan; H3 tidak didukung. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai p , bukan pada pernyataan bahwa tata kelola tidak memiliki arti substantif.

Secara simultan, model signifikan ($F = 10,285$; $p < 0,001$), sehingga H4 didukung. Nilai R^2 sebesar 0,303 menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan *good governance* bersama-sama menjelaskan 30,3% variasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Sisanya berkaitan dengan faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

PEMBAHASAN

Transparansi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan

Hasil estimasi menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara transparansi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah; dengan demikian, H1 didukung. Secara teoretis, keterbukaan informasi mengurangi asimetri informasi karena pegawai dan pemangku kepentingan memperoleh rujukan yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan, prosedur, dan capaian anggaran. Temuan ini mendukung hasil Eriva dan Handayani (2024), Edowai et al. (2021), Amelia dan Hidajat (2025), serta Fathirah et al. (2024). Temuan tersebut juga searah dengan telaah sistematis de Renzio dan Wehner (2017), yang menunjukkan bahwa keterbukaan fiskal berkaitan dengan peningkatan kualitas anggaran serta sejumlah hasil tata kelola, meskipun bukti kausal yang kuat masih terbatas. Pada tingkat operasional, hasil penelitian memperkuat arti aksesibilitas dan ketepatan waktu pengungkapan yang ditekankan Ritonga dan Syahrir (2016), serta dukungan sistem informasi keuangan daerah yang dibahas Maulidi et al. (2025).

Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Merchilia dan Robinson (2024), yang melaporkan pengaruh negatif transparansi, maupun Mbipi et al. (2021), yang tidak menemukan pengaruh signifikan transparansi dan aksesibilitas pelaporan terhadap kinerja. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh variasi definisi operasional, jenis informasi yang dibuka, ketepatan waktu, kapasitas pengguna, dan karakteristik institusi. Telaah Cucciniello et al. (2017) menegaskan bahwa konsekuensi transparansi tidak seragam karena bergantung pada bentuk transparansi, hasil yang dinilai, metode penelitian, dan kondisi institusional. Oleh sebab itu, hubungan positif pada BPKK Pidie Jaya lebih tepat ditafsirkan sebagai manfaat transparansi yang informasinya tersedia, dapat dipahami, tepat waktu, dan benar-benar digunakan dalam proses pengelolaan, bukan sekadar sebagai akibat bertambahnya jumlah dokumen yang dipublikasikan.

Akuntabilitas dan Kinerja Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja pengelolaan keuangan; karena itu, H2 didukung. Temuan ini konsisten dengan Edowai et al. (2021), Merchilia dan Robinson (2024), serta Amelia dan Hidajat (2025), yang menunjukkan bahwa kejelasan pertanggungjawaban berkaitan dengan peningkatan kinerja sektor publik. Hasil tersebut juga memperkuat Pasaribu et al. (2024) mengenai penerapan standar akuntansi yang efektif serta



Aisyah et al. (2024) dan Adira et al. (2024) mengenai fungsi audit, pengawasan internal, dan tindak lanjut. Secara substantif, pembagian tanggung jawab yang jelas, dokumentasi keputusan, perbandingan capaian dengan target, dan tindak lanjut atas penyimpangan membentuk mekanisme kontrol yang dapat meningkatkan disiplin pelaksanaan dan kualitas pelaporan.

Meskipun demikian, hasil ini berbeda dari Mbipi et al. (2021), yang tidak menemukan pengaruh signifikan akuntabilitas pelaporan terhadap kinerja. Perbedaan itu mendukung argumentasi Dubnick (2005) bahwa hubungan akuntabilitas dan kinerja tidak berlangsung secara otomatis, melainkan ditentukan oleh mekanisme yang menghubungkan kewajiban memberi penjelasan dengan evaluasi, umpan balik, koreksi, serta konsekuensi manajerial. Dengan demikian, koefisien positif pada penelitian ini tidak cukup dijelaskan oleh keberadaan laporan formal. Akuntabilitas perlu melekat pada seluruh siklus anggaran dan menghasilkan tindakan korektif yang terverifikasi agar dapat berfungsi sebagai penggerak kinerja BPKK Pidie Jaya.

Good Governance dan Kinerja Pengelolaan Keuangan

Koefisien *good governance* positif, tetapi tidak signifikan setelah transparansi dan akuntabilitas dimasukkan ke dalam model; dengan demikian, H3 tidak didukung. Hasil ini berbeda dari Indriana dan Nasrun (2019), yang menemukan pengaruh positif *good governance* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, koefisien yang tidak signifikan tidak membuktikan bahwa tata kelola yang baik tidak memiliki arti substantif. Penafsiran yang lebih tepat ialah bahwa model belum menemukan kontribusi parsial *good governance* yang terpisah dari transparansi dan akuntabilitas. Penafsiran ini sejalan dengan Fukuyama (2013), yang menyoroti persoalan konseptual dan pengukuran kualitas pemerintahan, serta Grindle (2004), yang menunjukkan bahwa agenda tata kelola yang sangat luas perlu dipilah menjadi unsur yang esensial, terukur, dan dapat diterapkan.

Perbedaan hasil antarpelelitian dapat dipengaruhi karakteristik organisasi, komposisi responden, tingkat analisis, instrumen pengukuran, dan cara konstruk tata kelola dioperasionalkan. Dalam model penelitian ini, transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur inti *good governance* sehingga sebagian variasi konstruk payung tersebut diduga telah diserap oleh kedua prediktor spesifik. Nilai tolerance dan VIF memang tidak menunjukkan multikolinearitas yang bermasalah, tetapi kelayakan statistik itu tidak menghapus tumpang tindih konseptual. Penelitian berikutnya perlu menguji dimensi partisipasi, responsivitas, efektivitas, kepatuhan hukum, dan integritas secara terpisah, serta menggunakan analisis hierarkis atau pemodelan persamaan struktural untuk menilai daya jelas tambahan setiap dimensi.

Pengaruh Simultan dan Daya Jelaskan Model

Signifikansi uji F menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan *good governance* secara bersama-sama relevan dalam menjelaskan variasi kinerja; oleh karena itu, H4 didukung. Namun, R^2 sebesar 30,3% menunjukkan bahwa daya jelas model masih terbatas. Hasil tersebut dapat dipahami dengan membandingkan bukti terdahulu: Eriva dan Handayani (2024) menempatkan kompetensi dan pengalaman kerja sebagai determinan kinerja, Ramadana et al. (2023) menunjukkan relevansi belanja modal dan pengukuran berbasis akrual, sedangkan Adira



et al. (2024) dan Maulidi et al. (2025) menekankan kapasitas pengawasan dan kesiapan infrastruktur digital. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan merupakan hasil interaksi mekanisme tata kelola, kapasitas aparatur, sistem pengendalian, dan dukungan teknologi. Model berikutnya perlu memasukkan faktor tersebut serta menguji pengaruh langsung, mediasi, dan moderasi agar variasi kinerja dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

IMPLIKASI PRAKTIS

Akses informasi. BPKK perlu memastikan dokumen anggaran, realisasi, dan pertanggungjawaban tersedia tepat waktu, memiliki ringkasan yang mudah dipahami, serta dapat ditelusuri melalui kanal publik yang konsisten.

Mekanisme akuntabilitas. Tanggung jawab setiap tahap pengelolaan keuangan perlu dipetakan secara eksplisit, disertai indikator kinerja, bukti tindak lanjut, dan umpan balik atas temuan atau penyimpangan.

Operasionalisasi tata kelola. Prinsip *good governance* perlu diterjemahkan menjadi rutinitas yang dapat diamati dan diukur, seperti forum partisipasi, standar waktu respons, jejak digital keputusan, pengendalian konflik kepentingan, dan evaluasi kepatuhan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian terbatas pada satu instansi dengan 75 responden, sehingga generalisasi ke pemerintah daerah lain perlu dilakukan secara hati-hati. Seluruh variabel diukur melalui kuesioner persepsi pada sumber responden yang sama, sehingga bias metode umum dan kecenderungan jawaban sosial tetap mungkin terjadi. Kedekatan konseptual antara transparansi, akuntabilitas, dan *good governance* juga perlu ditangani melalui pengujian validitas konstruk yang lebih kuat. Desain survei ini menunjukkan asosiasi statistik, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan hubungan kausal. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan lebih dari satu kabupaten, melibatkan pemangku kepentingan eksternal, menggabungkan data persepsi dengan indikator objektif, dan menguji setiap dimensi tata kelola secara terpisah.

SIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada BPKK Pidie Jaya. *Good governance* menunjukkan arah koefisien positif, tetapi tidak memiliki kontribusi parsial yang signifikan setelah dua mekanisme tersebut dikendalikan. Secara simultan, model signifikan dan menjelaskan 30,3% variasi kinerja.

Temuan menempatkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban sebagai prioritas penguatan yang paling konkret. Pada saat yang sama, hasil yang tidak signifikan untuk *good governance* perlu dibaca sebagai dorongan untuk memperjelas indikator dan menerjemahkan prinsip tata kelola yang luas ke dalam prosedur, perilaku, dan ukuran kinerja yang dapat diamati.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Addink, H. (2019). *Good governance: Concept and context*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780198841159.001.0001>
- Adira, S., Saputri, C. A., Arnita, A., & Mariana, M. (2024). Peran inspektorat daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 353-365.
<https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1392>
- Aisyah, M. S., Amanda, A., Fakia, I., & Mariana, M. (2024). Evaluasi kinerja BPK dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 302-311.
<https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1408>
- Amelia, H. L., & Hidajat, S. (2025). Pengaruh partisipasi, transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan instansi publik. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 562-573.
<https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1699>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmeliikhuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32-44.
<https://doi.org/10.1111/puar.12685>
- de Renzio, P., & Wehner, J. (2017). The impacts of fiscal openness. *The World Bank Research Observer*, 32(2), 185-210.
<https://doi.org/10.1093/wbro/lkx004>
- Dubnick, M. J. (2005). Accountability and the promise of performance: In search of the mechanisms. *Public Performance & Management Review*, 28(3), 376-417.
<https://doi.org/10.1080/15309576.2005.11051839>
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87-96.
<https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Eriva, C. Y., & Handayani, M. (2024). Pengaruh transparansi, kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(1), 22-32.
<https://jurnal.politeknikaceh.ac.id/index.php/jia/article/view/276>
- Fathirah, D., Nirwana, N., & Haliah, H. (2024). Budget transparency and accountability in local government. *Asian Journal of Management Analytics*, 3(4), 1171-1184.
<https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11878>
- Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347-368.
<https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, 17(4), 525-548.
<https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x>
- Hood, C. (2010). Accountability and transparency: Siamese twins, matching parts, awkward couple? *West European Politics*, 33(5), 989-1009.
<https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486122>



- Indriana, I., & Nasrun, M. (2019). Pengaruh good governance terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 8(1), 19-26. <https://doi.org/10.35906/je001.v8i1.330>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Mariana, M., Diana, D., Arifai, M., & Jannah, M. (2025). Public sector accounting reform: A systematic literature review. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 132-141. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i2.320>
- Maulidi, M. R., Safira, Z., Nabila, J., Mariana, M., & Rahmati, R. (2025). Digital transformation in local government: Enhancing financial transparency through the Regional Financial Information System (SIKD). *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 54-66. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.266>
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan keuangan daerah dan good governance terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152-158. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503>
- Merchilia, S., & Robinson. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bengkulu. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 5326-5338. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1134>
- Pasaribu, P. N. P., Nuri, H., Arsyah, M., & Mariana, M. (2024). Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan yang efektif. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 1-8. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1375>
- Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. (2024). *Transparansi keuangan daerah tahun 2024*. <https://pidiejayakab.go.id/halaman/transparansi-keuangan-daerah-tahun-2024>
- Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. (2025, 23 Mei). *Bupati Pidie Jaya menerima LHP dengan WTP dari BPK RI terhadap LKPD tahun anggaran 2024*. <https://pidiejayakab.go.id/berita/kategori/berita/bupati-pidie-jaya-menerima-lhp-dengan-wtp-dari-bpk-ri-terhadap-lkpd-tahun-anggaran-2024>
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmani, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831-1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49029/pp-no-8-tahun-2006>
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>



Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: Berbasis website. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2), 110-126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>